



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RICKY MAKADO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

Pt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
RIAU,

(DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

| No | Sasaran Program                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                         | 90%    |
| 2  | Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Tranformasi Sistem Penuntutan           | Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang memenuhi Prinsip Keadilan | 100%   |
|    |                                                                                                       | Penanganan Perkara Pidana Khusus TPPU yang memenuhi Prinsip Keadilan               | 100%   |
| 3  | Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara                        | 100%   |
|    |                                                                                                       | Tingkat Penyelesaian Penyelamatan                                                  | 90%    |

| No | Sasaran Program                                                          | Indikator Kinerja                                                 | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Negara                                                                   | dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana dan Perdata |        |
| 4  | Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel | Nilai Evaluasi Internal SAKIP                                     | 90%    |
|    |                                                                          | Nilai Kinerja Anggaran                                            | 100%   |

| No     | Kegiatan                                    | Anggaran          |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.623.576.000 |
| 2      | Program Dukungan Manajemen                  | Rp. 7.974.224.000 |
| Jumlah |                                             | Rp. 9.597.800.000 |

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Prioritas Nasional 1 berfokus pada memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
- Prioritas Nasional 7 berfokus pada memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi, dan penyelundupan.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Selatpanjang, 09 September 2025

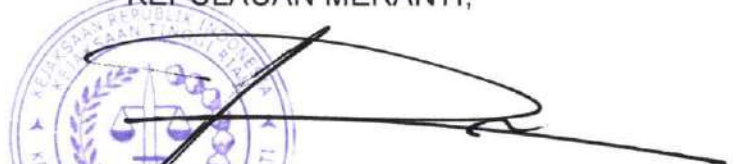
Pihak Kedua,

Plt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
RIAU,

  
(DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

  
(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DOLI NOVAISAL, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RICKY MAKADO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(DOLI NOVAISAL, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

| No | Sasaran Program                                                                              | Indikator Kinerja                                                 | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI                                    | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                     | 100%   |
| 2  | Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI | Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan          | 100%   |
| 3  | Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset                                         | Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara | 100%   |

| No | Sasaran Program                                         | Indikator Kinerja                                                    | Target |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 4  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum | Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker | 90%    |

| No     | Kegiatan                                    | Anggaran          |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.623.576.000 |
| 2      | Program Dukungan Manajemen                  | Rp. 7.974.224.000 |
| Jumlah |                                             | Rp. 9.597.800.000 |

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Selatpanjang, 09 September 2025

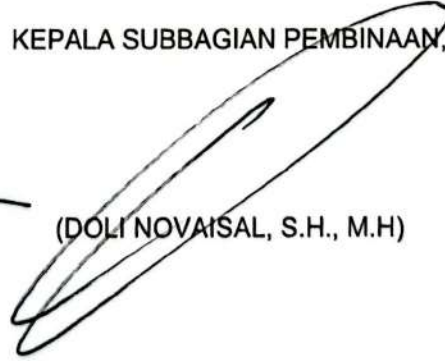
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

  
(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

  
(DOLI NOVAISAL, S.H., M.H.)





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DODIYANSAH PUTRA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RICKY MAKADO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

  
(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

  
(DODIYANSAH PUTRA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Program</b>                                                                                             | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                         | <b>Target</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan | Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan | 100%          |
| 2         | Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan          | Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan          | 100%          |
| 3         | Meningkatnya pelaksanaan                                                                                           | Persentase pelaksanaan Operasi                                                                                   |               |



| <b>N<br/>o</b> | <b>Sasaran Program</b>                                                                          | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                  | <b>Target</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan                             | Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan                                               | 100%          |
| 4              | Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis                                          | Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis                                                      | 100%          |
| 5              | Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen | Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen | 100%          |
| 6              | Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum                             | Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum                                     | 100%          |
| 7              | Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum     | Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum                     | 90%           |

| <b>N<br/>o</b> | <b>Kegiatan</b>                             | <b>Anggaran</b>   |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1              | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.623.576.000 |
| 2              | Program Dukungan Manajemen                  | Rp. 7.974.224.000 |
| Jumlah         |                                             | Rp. 9.597.800.000 |

#### **D. PRIORITAS NASIONAL**

- Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7

#### **E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,



(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(DODIYANSAH PUTRA, S.H., M.H.)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACEP VIKI ROSDINAR, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RICKY MAKADO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(ACEP VIKI ROSDINAR, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Program</b>                                                                                   | <b>Indikator Kinerja</b>                                                  | <b>Target</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif | Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif      | 100%          |
| 2         | Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum                                 | Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan | 100%          |
|           |                                                                                                          | Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan     | 100%          |

| N<br>o | Sasaran Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                            | Target |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                                                                                   | Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi | 100%   |
| 3      | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum                                                  | 90%    |

| N<br>o | Kegiatan                                    | Anggaran          |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.623.576.000 |
| 2      | Program Dukungan Manajemen                  | Rp. 7.974.224.000 |
| Jumlah |                                             | Rp. 9.597.800.000 |

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(ACEP VIKI ROSDINAR, S.H., M.H.)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YURIDHO FADLIN, S.H, M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RICKY MAKADO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KEPULAUAN MERANTI,

(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,

(YURIDHO FADLIN, S.H, M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**  
**KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Program</b>                                                                           | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                   | <b>Target</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset                                        | Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara                                           | 100%          |
|           |                                                                                                  | Persentase penyelesaian pemulihan aset negara                                              | 100%          |
| 2         | Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset | Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset | 90%           |

| N<br>o | Kegiatan                                    | Anggaran          |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.623.576.000 |
| 2      | Program Dukungan Manajemen                  | Rp. 7.974.224.000 |
| Jumlah |                                             | Rp. 9.597.800.000 |

**D. PRIORITAS NASIONAL**

- Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,

(YURIDHO FADLIN, S.H, M.H.)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. MEGA TRI ASTUTI Z, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RICKY MAKADO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

  
(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

  
(Dr. MEGA TRI ASTUTI Z, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

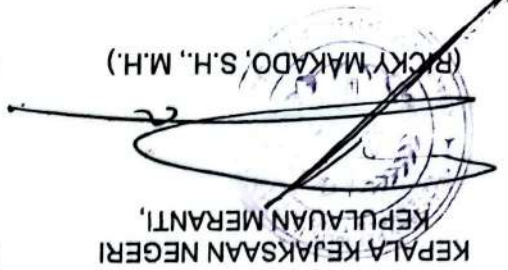
**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Program</b>                                                       | <b>Indikator Kinerja</b>                                                      | <b>Target</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara | Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi           | 100%          |
|           |                                                                              | Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi       | 100%          |
|           |                                                                              | Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi | 100%          |

  
 KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,  
 Pihak Pertama,

  
 KEPALA KEJAKSAAN NEGRI  
 KEPULAUAN MERANTI,  
 Pihak Kedua,

Selatpanjang, 09 September 2025

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

E. KINERJA TAMBAHAN

D. PRIORITAS NASIONAL

- Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7

| N o | Kegiatan                                    | Anggaran          | Jumlah |                                                 |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|
|     |                                             |                   | 1      | 2                                               |
| 1   | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.623.576.000 |        | Program Dukungan Manajemen<br>Rp. 7.974.224.000 |
| 2   |                                             |                   |        |                                                 |
| 3   |                                             |                   |        |                                                 |
| 4   |                                             |                   |        |                                                 |

| N o | Sasaran Program                                                                                               | Indikator Kinerja                                                               | Target |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
|     |                                                                                                               |                                                                                 |        | 2 | 3 |
| 1   | Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata                                      | Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata                   | 100%   |   |   |
| 2   | Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian hukuman lain                                                      | Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lain        | 100%   |   |   |
| 3   | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara | 90%    |   |   |



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RICKY MAKADO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 09 September 2025

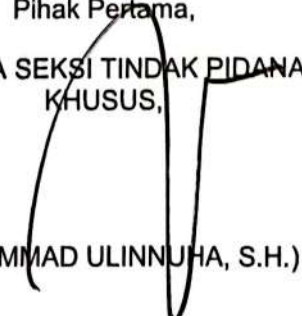
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,

  
(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
KHUSUS,

  
(MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**  
**KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

| No | Sasaran Program                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                           | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat                                       | 100%   |
|    |                                                                                                                          | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan | 100%   |
|    |                                                                                                                          | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan   | 100%   |

| No | Sasaran Program                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                         | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                                                       | Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan                             | 100%   |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan                                 | 100%   |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi                                                   | 100%   |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus                                              | 90%    |
| 2  | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional | Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan | 100%   |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan    | 100%   |
|    |                                                                                                                                                       | Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi                       | 100%   |

| No     | Kegiatan                                    | Anggaran          |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.623.576.000 |
| 2      | Program Dukungan Manajemen                  | Rp. 7.974.224.000 |
| Jumlah |                                             | Rp. 9.597.800.000 |

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7

#### E. KINERJA TAMBAHAN

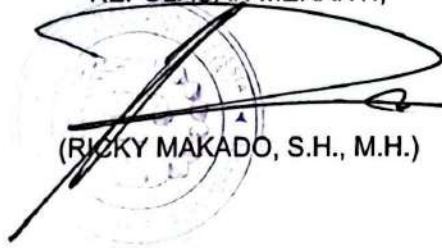
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Selatpanjang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN MERANTI,



(RICKY MAKADO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
KHUSUS,



(MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.)